

## **ABSTRAK**

Otonomi Daerah juga memiliki tujuan agar terciptanya pembagian urusan pemerintahan antara pusat dan daerah, termasuk pembagian keuangan negara. Adanya Otonomi Daerah telah memberikan kekuasaan kepada daerah untuk mengatur daerah otonomnya sendiri. Kekuasaan baik di pusat maupun di daerah memang cendrung lebih mudah untuk korup. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Mengapa dibentuk Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah dalam upaya penegakan tindak pidana korupsi di Kejaksaaan Negeri Purworejo? Bagaimanakah Peran Kejaksaan sebagai Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaaan Negeri Purworejo? Apakah faktor penghambat dari Peran Kejaksaan sebagai Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah dalam Upaya Pencegahan Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaaan Negeri Purworejo dan bagaimana solusinya?

Metode yang digunakan peneliti adalah pendekatan hukum secara yuridis sosiologis dan spesifikasi dalam penelitian ini adalah termasuk deskriptif analisis. Adapun sumber dan jenis data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh dari studi lapangan wawancara dengan Jaksa Penuntut Umum di Kejaksaaan Negeri Purworejo. Dan data sekunder diperoleh dari studi kepustakaan. Data dianalisa secara kualitatif. Permasalahan tersebut dikaji dengan teori pengawasan, kewenangan dan penegakan hukum.

Berdasarkan hasil dari penelitian bahwa Tujuan dibentuknya Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah Dan Pembangunan Daerah, yakni: 1) Untuk menghilangkan keragu-raguan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), dan pelaksana kegiatan dalam melaksanakan kegiatannya, 2) terserapnya anggaran dengan baik dan tepat waktu, dan 3) Pembangunan Kabupaten Purworejo dapat berjalan dengan baik tanpa korupsi. Peran Kejaksaan sebagai Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah dalam upaya pencegahan Tindak Pidana Korupsi dibagi menjadi tiga yaitu Peran Normatif berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor : KEP-152/A/JA/10/2015 tentang Pembentukan Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan. Peran Ideal berdasarkan Kode Perilaku Jaks yang diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-067/A/JA/07/2007 dan Standar Minimum Profesi Jaksa diatur dalam Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER-066/A/JA/07/2007 dan peran faktual berdasarkan Penandatangan *Memorandum of Understanding* (MoU) pengembangan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA) Keuangan dalam proses pencairan SP2D secara online di lingkungan Pemerintah Kabupaten Purworejo. Faktor hukumnya sendiri, faktor penegak hukum yang masih belum banyak memahami aturan hukum, faktor sarana dan fasilitas pendukung yang belum memadai, faktor masyarakat dan faktor budaya. faktor penghambat yang paling dominan faktor kualitas dan kuantitas dari penegak hukum khususnya jaksa yang terlibat dalam Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah sebagai pengawas proyek pembangunan harus memiliki integritas yang tinggi dan mampu untuk tidak terlibat dengan budaya korupsi serta suap menuap dikarenakan pada proyek pembangunan rawan terjadi kasus korupsi dan suap menuap. Solusinya yaitu: a) Pencegahan/preventif dan persuasive, b) Pendampingan Hukum; c) Melakukan Koordinasi dengan APIP dan/atau instansi terkait; d) Melakukan Monitoring dan Evaluasi; dan e) Melakukan penegakan hukum represif.

**Kata kunci : Peran, TP4D, Tindak Pidana Korupsi**

## **ABSTRACT**

*Regional Autonomy also aims to create a division of governmental affairs between the center and the regions, including the distribution of state finances. The existence of regional autonomy has given power to the regions to regulate their own autonomous regions. Power both at the center and in the regions tends to be easier to corrupt. The formulation of the problem in this study are: Why was the Team of Guard, Government Security and Regional Development formed in an effort to uphold corruption in Purworejo District Attorney? What is the Role of the Prosecutor's Office as a Guard Team, Government Security and Regional Development in the Prevention of Corruption in the Purworejo District Prosecutor's Office? the solution?*

*The method used by researchers is a sociological juridical legal approach and the specifications in this study are including descriptive analysis. As for the source and type of data in this study are primary data obtained from field study interviews with the Public Prosecutor at the Purworejo District Attorney's Office. And secondary data obtained from library research. Data analyzed qualitatively. The problem is examined with the theory of supervision, authority and law enforcement.*

*Based on the results of the study that the purpose of the formation of the Guards Team, Government Security and Regional Development, namely: 1) To eliminate the doubts of Budget User Authority (KPA), Commitment Making Officials (PPK), and implementing activities in carrying out their activities, 2) absorption of the budget well and on time, and 3) Development of Purworejo Regency can run well without corruption. The role of the Prosecutor's Office as a Guard Team, Government Security and Regional Development in the effort to prevent Corruption Crimes is divided into three, namely the Normative Role based on the Decree of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number: KEP-152 / A / JA / 10/2015 concerning the Formation of the Guard Team, Government Security and Development. The Ideal Role based on the Prosecutor's Code of Conduct as stipulated in the Regulation of the Attorney General of the Republic of Indonesia Number: PER-067 / A / JA / 07/2007 and the Minimum Standards for Professional Prosecutors regulated in the Attorney General's Regulation Number: PER-066 / A / JA / 07 / 2007 and the factual role based on the Signing of the Memorandum of Understanding (MoU) for the development of the Financial Management Information System (SIMDA) application in the online SP2D disbursement process within the Purworejo District Government. The legal factor itself, law enforcement factors that still do not understand the rule of law, inadequate supporting facilities and facilities, community factors and cultural factors. the most dominant inhibiting factor is the quality and quantity of law enforcement, especially prosecutors involved in the Guard Team, Government Security and Regional Development as supervisors of development projects must have high integrity and be able not to get involved with a culture of corruption and bribery due to vulnerable development projects there were cases of corruption and bribery. The solutions are: a) Prevention / prevention and persuasion, b) Legal Assistance; c) Coordinate with APIP and / or related agencies; d) Carry out Monitoring and Evaluation; and e) Carry out repressive law enforcement*

**Keywords:** *Role, TP4D, Corruption*